

**TESIS**

**PENGAWASAN TERHADAP MALADMINISTRASI DALAM  
PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK  
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum*



Oleh :

**MAYA YULITA**  
**1820112035**

**Pembimbing :**

**Dr. Yuslim, S.H., M.H**  
**Dr. Anton Rosari, S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

**PENGAWASAN TERHADAP MALADMINISTRASI DALAM  
PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK  
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Maya Yulita, Nim: 1820112035, Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 110 Halaman.**

**ABSTRAK**

Perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian salah satunya adalah mengenai pembagian nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada anak dan mantan istri. Dalam proses pemberian nafkah tersebut, ditemui adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. Lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi dugaan maladministrasi adalah Ombudsman. Maladministrasi yang terjadi adalah tidak memberikan pelayanan dan penundaan berlarut yang dilakukan oleh instansi terkait pemberian nafkah pasca perceraian tersebut. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan asas pelayanan publik yang harusnya memberikan pelayanan publik yang optimal dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Adapun rumusan masalah yaitu pengawasan terhadap maladministrasi terkait pemenuhan nafkah terhadap istri dan anak oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dan bagaimana penyelesaian sengketa oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat? Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori kewenangan, keadilan dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (*sociological research*) yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat adalah bersifat pasif karena ombudsman baru bisa melaksanakan tugasnya apabila sudah ada laporan dari masyarakat yang dirugikan akibat adanya maladministrasi dalam proses penyelenggaraan negara yang dalam hal ini adalah maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat instansi tertentu sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena masyarakat tersebut tidak mendapatkan hak pasca bercerai dengan suami. Penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah dengan memanggil para pihak yang terkait dengan permasalahan ini, meminta klarifikasi kepada pihak terlapor dan pada tahap akhir akan dikeluarkan rekomendasi oleh Ombudsman. Namun penyelesaian sengketa juga dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak terlalu terikat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, jalan yang dipilih adalah *win-win solution* yang saling menguntungkan bagi para pihak namun tetap dalam pengawasan ombudsman dan ombudsman juga memberikan catatan perbaikan kedepan dalam proses penyelesaian maladministrasi tersebut.

Kata Kunci: Ombudsman, Maladministrasi, Perceraian.